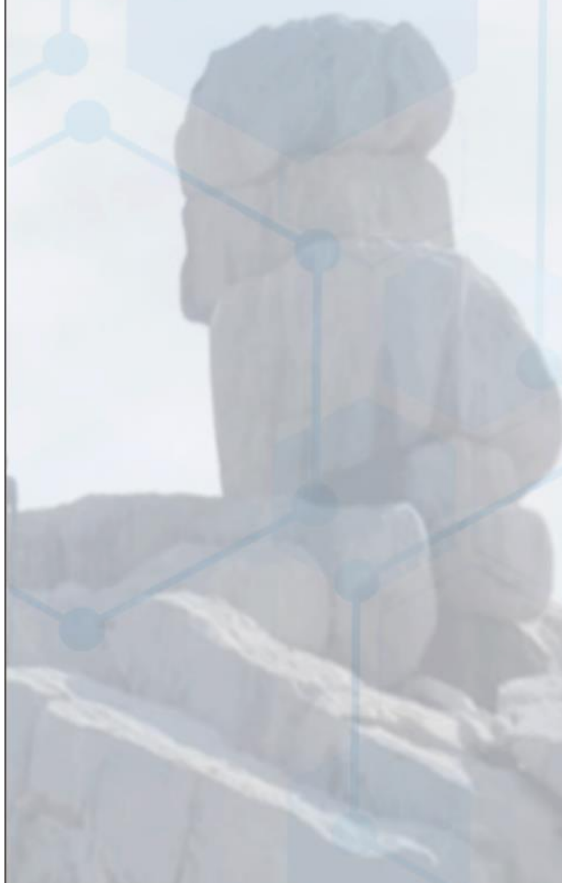




PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan.

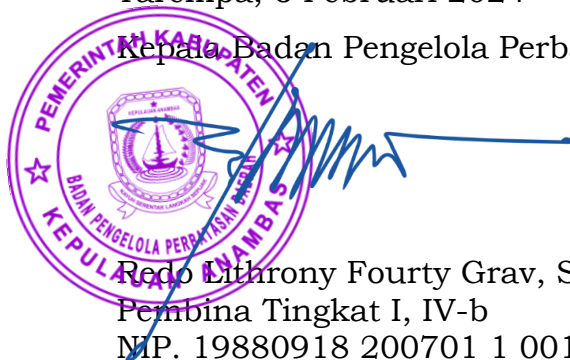
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana sub kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua stakeholder dan/atau pihak pemangku kepentingan.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 6 Februari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,



Redo Lithrony Fourty Grav, S.IP
Pembina Tingkat I, IV-b
NP. 19880918 200701 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	31
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	34
3.3. Program dan Kegiatan.....	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel. 2. 1	Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun Anggaran 2023	10
Tabel. 2. 2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPD dan Pencapaian Renstra BPPD s/d Tahun 2023	13
Tabel. 2. 3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra	18
Tabel. 2. 4	Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas ..	19
Tabel. 2. 5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	25
Tabel. 2. 6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	30
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025.....	35
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	38
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Tahun 2025	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Ranwal Rencana Kerja Tahun 2025 dirumuskan untuk menyinkronkan dan menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tema “Optimalisasi Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Berkelanjutan”. Program dan Kegiatan dimaksud mengakomodir tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan daerah.

Dalam rangka mensinergi tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelola Perbatasan Daerah mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
25. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta sasaran yang ingin di capai pada Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Tujuan

Tujuan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025 dalam rangka :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di bidang pengelolaan perbatasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pelaksana pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
5. Sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mudah melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dari target yang telah ditetapkan;
6. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan perbatasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPD

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai Renstra yang telah ditetapkan, untuk dapat mengetahui program/kegiatan dan sub kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 terdiri dari program/kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar program kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas bisa terakomodir pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 serta pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas di alokasikan anggaran sebesar Rp.3.705.101.370 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Seratus Seribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dimana alokasi anggaran tersebut sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji pegawai tidak tetap (PTT). Dan sangat diharapkan dalam pengalokasian anggaran pengawasan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dengan alokasi anggaran yang maksimal guna meningkatkan pengelolaan perbatasan negara Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada Tahun 2023 BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pagu dana yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pergeserannya sebesar Rp.3.239.530.497 (Tiga Miliar Dua Ratus tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah), dengan realisasi Rp.2.886.272.201 (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribuan Dua Ratus Satu Rupiah) atau 89,10%, sedangkan realisasi fisik mencapai 98,82% sebagaimana tertera pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi s.d. 31 Desember 2023		
			Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,050,011,297	2,721,896,281	83,02	94,12
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	100	100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	100	100
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,231,398,856	1,949,892,002		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,114,144,156	1,836,036,752	86,85	100
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	90,600,000	90,600,000	100	100
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26,654,700	23,255,250	87,25	100
III	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	323,623,595	312,841,280		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,323,900	7,323,114	99,99	100
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,785,200	14,784,978	100	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66,030,000	56,440,059	85,48	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,508,495	8,152,521	95,82	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226,976,000	226,140,608	99,63	99,63
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	298,581,540	275,218,950		
1	Pengadaan Mebel	144,867,100	144,496,350	99,74	100
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32,558,600	10,722,600	32,93	100
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	121,155,840	120,000,000	99,05	100
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170,567,306	164,475,049		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,683,100	41,501,457	95,01	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16,799,750	16,497,800	98,20	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,084,456	106,475,792	96,72	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi s.d. 31 Desember 2023		
			Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,340,000	2,969,000		
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9,340,000	2,969,000	31,79	100
B	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	189,519,200	164,375,920	5,07	5,16
I	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	130,229,700	122,804,920	94,30	95,66
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	130,229,700	122,804,920	94,30	95,66
II	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	30,406,600	14,565,000	47,90	49,68
1	Koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	30,406,600	14,565,000	47,90	49,68
III	Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan	28,882,900	27,006,000	93,50	95,47
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	28,882,900	27,006,000	93,50	95,47
	JUMLAH	3,239,530,497	2,886,272,201	89,10	99,29

Faktor yang menyebabkan realisasi keuangan tidak tercapai 100% adalah adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya Perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagaimana mestinya.

Implikasi (hasil akhir/kesimpulan) yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah beberapa Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah perlunya melakukan rekrutmen dan/atau penambahan personil

PNS/ASN yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPD.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPD Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPD dan Pencapaian Renstra BPPD s/d Tahun 2023

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PDerangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan		
									Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
5					Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan										
5	06				Badan Pengelola Perbatasan Daerah										
5	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
5	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
5	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	13 Dokumen	6	6	100%	6 Dokumen	25 Dokumen	80,1%	
5	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%	
5	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%	
5	06	01	2.01	04	Koordirasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%	

5	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKnerja SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	-	13 Orang/ Bulan	13 Orang/ Bulan	100%	13 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	50%
5	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66,7%
5	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
5	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapan yang Diadakan	150 Stel	-	-	-	-	20 Stel	20 Stel	13,3%
5	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

5	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66,7%
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,7%
5	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit	6 Unit	54,5%
5	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	20	26 Unit	26 Unit	100%	22 Unit	68 Unit	123%
5	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	3 Unit	5 Unit	3 Unit	60%	6 Unit	12 Unit	48%
5	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
5	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja)
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

5	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,7%
5	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
5	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
5	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	37,5
5	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	38 Unit	-	10 Unit	10 Unit	1000%	5 Unit	15 Unit	39,5%
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola								
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama								
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri								
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	20%

5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi								
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 yang telah disusun untuk 5 (lima) tahun ke depan, berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92
		Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)

Analisis kinerja pelayanan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPPD						Realisasi Capaian Tahun Lalu			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri			26,65%	29,32%	32,25%	35,47%	39,02%	42,92%	19,81%	26,81%	20,34%	35,47%	39,02%	
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara			20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	20%	20%	80%	100%	
3.	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	C (40,49)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 BPPD Tidak dilakukan penilaian	B (61,2)	BB (71)	
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	D (22,2)	B (65,75)	B (61,2)	BB (71)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong

- BPPD merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk sehingga masih memiliki energi dan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan.
- Adanya perhatian yang besar dari presiden Joko Widodo terhadap daerah perbatasan dengan jargoannya membangun dari pinggiran (perbatasan) serta menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah ASN pada BPPD.
- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan baik antar instansi horizontal maupun vertikal, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
- Masih lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sektor dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan dan penjagaan tanda batas wilayah negara tidak berjalan maksimal.
- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas dan Kinerja BPPD.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah khususnya Lokpri
 - a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
 - c. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
 - a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
 - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
 - c. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
 - a. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
 - b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
 - c. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Kecamatan Lokpri dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pembangunan perbatasan negara di Kecamatan Lokpri
2. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Strategi Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
 - Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
 - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	3.759.782.442	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	3.759.782.442
	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			16.500.000	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			16.500.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	16.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	16.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.805.393.945	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.805.393.945
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	15 Orang/ Bulan	2.670.319.245	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	15 Orang/ Bulan	2.670.319.245
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	22.634.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	22.634.700

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.308.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.308.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			347.234.430	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			347.234.430
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	8.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	9.090.625	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	9.090.625
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	85.480.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	85.480.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	14.457.805	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	14.457.805
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	230.206.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	230.206.000

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			286.712.153	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			286.712.153
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	3 Unit	79.614.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	3 Unit	79.614.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	22 Unit	40.988.859	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	22 Unit	40.988.859
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	8 Unit	44.953.454	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	8 Unit	44.953.454
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	80 M²	121.155.840	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	80 M²	121.155.840
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.281.264	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.281.264
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	43.971.800	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	43.971.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	34.545.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	34.545.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	186.764.464	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	186.764.464

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.352.650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.352.650
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	6.232.650	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	6.232.650
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	5 Unit	5.120.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	Unit	5.120.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		100%	265.915.642	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		100%	265.915.642
	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			77.580.535	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			77.580.535
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	77.580.535	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	77.580.535
	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri			77.663.137	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri			77.663.137
	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	77.633.137	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	77.633.137
	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			110.671.970	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			110.671.970

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	110.671.970	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	110.671.970
JUMLAH					4.025.698.084	JUMLAH				4.025.698.084

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2025 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas perencanaan pembangunan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah, berikut tabel penelaahan usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

Tidak Ada Usulan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan

kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar,

Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Infrastruktur digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup

Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas yang difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

2. Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.

3. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan

Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah menetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yaitu :

- 1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel;**
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara;**
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih.**

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2021-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2025

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Persen	39,02
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Persen	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (71)

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini,

merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 dan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2024, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 ini memuat 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Subkegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk

mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra-PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	3.759.782.442		100%	5.510.453.165
5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			16.500.000			58.930.142
5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	16.500.000		6 Dok	16.500.000
5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.805.393.945			4.126.422.869
5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	15 Orang/ Bulan	2.670.319.245		30 Orang/ Bulan	3.879.436.861
5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000		1 Dok	241.982.984
5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	22.634.700		1 Laporan	5.003.024
5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.308.000			7.308.000
5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000		1 Laporan	7.308.000
5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000			109.395.563

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	20.000.000		1 Paket	109.395.563
5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			347.234.430			460.718.196
5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	8.000.000		1 Paket	7.278.451
5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	9.090.625		1 Paket	9.068.892
5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	85.480.000		1 Paket	108.338.072
5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	14.457.805		1 Paket	64.367.133
5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	230.206.000		1 Laporan	243.101.250
5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			286.712.153			560.401.075
5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	3 Unit	79.614.000		2 Unit	61.534.000
5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	22 Unit	40.988.859		40 Unit	85.000.000
5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	8 Unit	44.953.454		10 Unit	109.990.513
8.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	80 M²	121.155.840		160 M²	303.876.563
5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.281.264			587.208.031

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	43.971.800		1 Laporan	76.500.925
5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	34.545.000		1 Laporan	20.858.087
5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	186.764.464		1 Laporan	489.849.019
5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.352.650			12.640.000
5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	6.232.650		2 Unit	4.000.000
5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	5 Unit	5.120.000		10 Unit	8.640.000
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		100%	265.915.642		100%	775.608.750
5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			77.580.535			208.372.500
5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	77.580.535		1 Dok	104.186.250
5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri			77.663.137			439.897.500
5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	77.633.137		1 Dok	231.525.000
5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			110.671.970			127.338.750
5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	110.671.970		1 Dok	115.576.250
Jumlah					4.025.698.084			6.344.992.057

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2024. Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah		100%	3.759.782.442	APBD	
		Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	5.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun			16.500.000	APBD	
			5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	16.500.000	APBD	
			5.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.805.393.945	APBD	
			5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	15 Orang/Bulan	2.670.319.245	APBD	
			5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	
			5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	22.634.700	APBD	
			5.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.308.000	APBD	
			5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000	APBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
			5.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000	APBD	
			5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	20.000.000	APBD	
			5.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			347.234.430	APBD	
			5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	8.000.000	APBD	
			5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	9.090.625	APBD	
			5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	85.480.000	APBD	
			5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	14.457.805	APBD	
			5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	230.206.000	APBD	
			5.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			286.712.153	APBD	
			5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	3 Unit	79.614.000	APBD	
			5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	22 Unit	40.988.859	APBD	
			5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	8 Unit	44.953.454	APBD	
			8.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	80 M ²	121.155.840	APBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
			5.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			265.281.264		
			5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	43.971.800	APBD	
			5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	34.545.000	APBD	
			5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	186.764.464	APBD	
			5.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			11.352.650	APBD	
			5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	6.232.650	APBD	
			5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	5 Unit	5.120.000	APBD	
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan berdasarkan lokpri		100%	265.915.642	APBD	
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah	Persentase terlaksananya peninjauan dan pemeliharaan	5.06.02.2.01	Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	Persentase Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama			77.580.535	APBD	
			5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	77.580.535	APBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Negara	n tanda batas wilayah Negara	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri			77.663.137	APBD	
			5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	77.633.137	APBD	
			5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			110.671.970	APBD	
			5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	110.671.970	APBD	
JUMLAH								4.025.698.084		

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/ kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 6 Februari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,



Redo Lithrony Fourty Grav, S.IP
Pembina Tingkat I, IV-b
NIP. 19880918 200701 1 001